

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan

Shohabatussa'adah¹, Muhammad Nasrullah²

¹) Program Studi Sarjana Akuntansi Syariah, IAIN Pekalongan

²) Dosen Program Studi Akuntansi Syariah, IAIN Pekalongan

Abstract: Local government financial reports are a form of government accountability for the use of public funds. Financial reports provided by local governments must be of high quality because there are many parties who rely on financial information for different uses. Human resource competence, technology use and internal control systems are some of the factors that can affect the quality of a local government financial report. The purpose of this study was to determine the effect of human resource competence, technology utilization and internal control systems on the quality of Pekalongan City local government financial reports. This research is a type of field research with a quantitative approach. The data collection method in this study is a questionnaire method using a sample of 51 respondents. The sampling technique was simple random sampling method. This study uses data analysis method multiple linear regression. The results showed that partially human resource competence ($t_{count} 0,541$) and the use of information technology ($t_{count} 1,743$) had no effect on the quality of local government financial reports because the value of $t_{count} < t_{table}$. The internal control system has a positive and significant effect on the quality of local government financial reports because the value of t_{count} is $6,274 > t_{table} 2,011$. Then simultaneously, the competence of human resources, the use of information technology and internal control systems affect the quality of the financial reports of the Pekalongan City government with $f_{count} 39,543 > f_{table} 2,80$.

Keywords: human resource competence, utilization of information technology, internal control systems and quality of local government financial reports

Abstrak: Laporan keuangan pemerintah daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan dana publik. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah haruslah berkualitas karena ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan dengan kegunaan yang berbeda-beda. Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas sebuah laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekalongan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kuesioner dengan menggunakan sampel sebanyak 51 responden. Teknik pengambilan sampel dengan metode simple random sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis data uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi sumber daya manusia ($t_{hitung} 0,541$) dan pemanfaatan teknologi informasi ($t_{hitung} 1,743$) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Adapun sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena nilai $t_{hitung} 6,274 > t_{tabel} 2,011$. Kemudian secara simultan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekalongan dengan $f_{hitung} 39,543 > f_{tabel} 2,80$.

Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

¹ Corresponding author's email: shohahtirto16@gmail.com

Pendahuluan

Upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan cerminan dari hasil aktivitas tertentu. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus berkualitas karena ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan dengan kegunaan yang berbeda-beda.

Informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mengandung kebermanfaatan, dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Yuliani & Agustini, 2016). Dalam PP No 71 Tahun 2010 telah disyaratkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yakni : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Latjandu dkk., 2016). (1) Relevan, informasi dikatakan relevan apabila mampu mempengaruhi sebuah keputusan dengan mengevaluasi kejadian masa lampau dan memprediksi kejadian di masa depan. (2) Andal, informasi dikatakan andal apabila laporan keuangan yang disajikan terhindar dari salah saji material dan dapat dibuktikan kebenarannya. (3) Dapat dibandingkan, artinya laporan keuangan yang disajikan dapat lebih memiliki nilai guna jika dibandingkan laporan keuangan sebelumnya. (4) Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan menggunakan istilah yang mudah dipahami oleh pengguna. Apabila laporan keuangan tidak memenuhi karakteristik kualitatif ini maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan

administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Salah satu tugas Badan Pemeriksa Keuangan ialah melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah. Hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan dalam bentuk opini audit. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD tahun 2019, secara keseluruhan, pada semester 1 tahun 2020, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini WTP atas 485 LKPD (90%), opini WDP atas 50 LKPD (9%) dan opini TW atas 6 LKPD (1%). Perkembangan opini LKPD dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2015-2019 :

Opini	Tahun									
	2015		2016		2017		2018		2019	
WTP	313	58%	378	70%	411	76%	443	82%	485	90%
WDP	194	36%	141	26%	113	21%	86	16%	50	9%
TW	31	5%	23	4%	18	3%	13	2%	6	1%
TMP	4	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Sumber: www.bpk.go.id -IHPS 1 Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa opini LKPD dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) mengalami peningkatan, LKPD yang memperoleh opini WTP dari yang semula hanya 58% pada tahun 2015 menjadi 90% pada tahun 2019 artinya LKPD selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan sejumlah 32%. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 4 poin dari 1% pada LKPD Tahun 2015 menjadi 0% pada LKPD tahun 2019.

Laporan keuangan adalah output dari disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Desiana Wati berpendapat bahwa sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Desiana wati, dkk juga menjelaskan bahwa keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia melainkan kompetensi SDM yang dimiliki (Wati dkk., 2014). Kompetensi adalah dasar untuk mencapai kinerja. SDM yang memiliki kompetensi yang baik akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif, efisien dan ekonomis. Namun sudah jadi permasalahan umum yang terjadi di pemerintahan khususnya pemerintah daerah bahwa untuk menerapkan manajemen sumber daya manusia, seringkali yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Nurillah & Muid, 2014). sehingga diharapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka dibutuhkan bukan hanya jumlah sumber daya manusia melainkan kompetensi yang dimilikinya juga. Laporan keuangan dapat diselesaikan secara cepat dengan adanya kompetensi yang dimiliki SDM. Hal ini terjadi karena telah didukung belakang pendidikan yang mumpuni, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Faktor-faktor tersebut selaras dengan penelitian dari Riandani bahwa semakin tinggi kompetensi SDM yang dimiliki satuan kerja subbagian ekonomi/keuangan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan mereka hasilkan (Riandani, 2017).

Sumber daya manusia juga harus menguasai teknologi informasi demi mencapai tujuan organisasi. Teknologi informasi mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat waktu maupun tenaga sehingga sangat membantu mempercepat proses penyampaian dan pemahaman informasi tentang pengelolaan keuangan. Aswandi juga menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi diharapkan dapat meningkatkan kinerja para akuntan dalam menyusun laporan keuangan dengan data yang akurat dan proses yang cepat (Aswandi, 2018). Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan standar yang ditetapkan sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah dapat meningkat. Namun kenyataannya tidak semua pegawai di pemerintahan memahami teknologi (Hardyansyah, 2016). Padahal, pemanfaatan teknologi informasi yang optimal akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pradono yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Pradono, 2015).

Pengelolaan keuangan yang baik harus dikelola oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan menguasai teknologi informasi. Untuk mencapai hal tersebut maka suatu instansi pemerintah membutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat. Sistem pengendalian intern bukanlah hal baru dalam pemerintahan. Petrovits menyatakan bahwa pengendalian intern adalah proses yang dilakukan manajemen untuk memberikan jaminan yang wajar terkait pencapaian operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (Petrovits dkk., 2011).

Sistem pengendalian intern dibangun dari lima komponen diantaranya: (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko;

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan

(3) aktivitas pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; serta (5) pemantauan pengendalian intern. Komponen pengendalian intern dirancang dan diimplementasikan untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian intern akan tercapai (Siahaya dkk., 2018). Namun, BPK masih menemukan masih banyaknya data-data yang tidak sesuai serta masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Pada tahun 2019 dari 541 LKPD ditemukan 10.499 permasalahan yang terdiri dari 5.175 (49%) terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan 5.324 (51%) terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan sistem pengendalian intern ini cukup menyita perhatian, pasalnya dari 5.175 ada beberapa faktor penyebab di antaranya sebagai berikut :

Jawa Tengah adalah salah satu dari enam provinsi di Pulau Jawa yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Salah satu dari enam kota tersebut adalah kota Pekalongan. Pekalongan merupakan salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, pemerintah daerah (Walikota Pekalongan) dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan. Selama 5 kali berturut-turut Kota Pekalongan mendapat opini WTP berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2019 di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Pemkot, 2020).

Hasil pemeriksaan tersebut merupakan kebanggaan bagi jajaran OPD Kota Pekalongan pada umumnya dan warga Kota Pekalongan pada umumnya. Prestasi 5 kali berturut – turut ini menjadi bahan yang bisa di gali mengapa bisa demikian sehingga bisa menjadi tolak ukur bagi kota dan kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah dalam pemerolehan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Akan tetapi, pemerolehan opini WTP ini belum tentu disebabkan oleh sumber daya manusia yang kompeten, pemanfaatan teknologi yang memadai dan pengoptimalan sistem pengendalian intern maka perlu di lakukan penelitian apakah tiga faktor tersebut benar-benar faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan dari pemerintah daerah atau tidak.

Berbicara mengenai prestasi yang ditorehkan Pemerintah Kota Pekalongan pastinya tidaklah luput dari kerja keras dan dukungan seluruh OPD Pemerintah Kota Pekalongan yang rela bersusah payah memberikan laporan kinerja terbaiknya. Prestasi ini mengantarkan Kota Pekalongan memperoleh penghargaan atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, kredibel dan transparan tahun 2019 dengan capaian WTP. Penghargaan ini adalah bukti sejarah dari awal pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pekalongan di bawah kepemimpinan H. M. Saelany Machfudz, SE dan penghargaan ini menjadi sebuah motivasi untuk menjadikan jajaran Pemerintah Kota Pekalongan untuk lebih semangat lagi dalam membangun Kota Pekalongan yang lebih baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan Kota Pekalongan. Alasan Kota Pekalongan diambil sebagai objek penelitian tidak lain adalah mudah di jangkau oleh peneliti sehingga dapat lebih efisiensi waktu, tenaga dan biaya serta untuk menyelesaikan penelitian ini tidak akan menghambat waktu penelitian karena sulit menjangkau objek penelitian.

Jenis penelitian ini berfokus pada penelitian survei di lapangan. Pendekatan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Ningrum (Ningrum, 2018) dan Yuliani & Agustini (Yuliani & Agustini, 2016) bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh kompetensi SDM pada kualitas LKPD Kota Pekalongan dibuktikan dengan menguji hipotesis 1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh pada kualitas LKPD Kota Pekalongan. Kompetensi SDM merupakan karakteristik pengetahuan, keahlian, dan perilaku untuk melakukan suatu pekerjaan atau melakukan tugas dan fungsi secara efektif. Secara konseptual dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kompetensi SDM, maka kualitas LKPD akan meningkat. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kompetensi maka kualitas LKPD semakin menurun. Kontradiksi antara teori dengan hasil penelitian dapat dijelaskan dengan melihat penilaian responden terhadap masing-masing indikator kompetensi SDM.

Kajian Literatur

Pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekalongan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,541, t_{tabel} sebesar 2,011, dan nilai signifikan sebesar 0,591. Hal ini berarti t_{hitung} 0,541 < t_{tabel} 0,541 dan nilai signifikan sebesar 0,591 > 0,05, maka H_0 di terima dan H_a ditolak sehingga variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) Kota Pekalongan.

Analisis diatas diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis tersebut dapat diartikan bahwa meningkatnya kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas LKPD. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Syarifudin (Syarifudin, 2014),

Kompetensi SDM tidak berpengaruh pada kualitas LKPD dikarenakan OPD lebih mengandalkan faktor lain. Berdasarkan data demografi responden hanya 16 dari 51 responden yang berlatar pendidikan akuntansi baik dari strata SMK, S1 maupun S2 dengan persentase sebesar 31,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebesar 68,6% lebih mengandalkan dari faktor lain seperti sistem pengendalian intern.

Untuk menunjang kemampuan dibutuhkan pelatihan berbasis kompetensi yang dananya disediakan oleh BKPPD akan tetapi dana tersebut terbatas karena sebagian besar dananya dialihkan untuk penanganan *Covid-19* yang berdampak pada penyelenggaraan pelatihan bahkan salah satu pegawai OPD yakni dari Dinas Lingkungan Hidup pasa saat pengisian kuesioner mengatakan bahwa belum pernah mengikuti pelatihan tersebut selama pindah di kursi jabatan Kasubag Keuangan yang bernetabene dari S2 IT (L. WP, komunikasi pribadi, 26 April 2021).

Tidak semua pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi paham dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan daerah. Penempatan pegawai subagian keuangan pada Kota Pekalongan menurut Bapak Ade Su'akad dari BKPPD Kota Pekalongan pada dasarnya untuk bagian teknis para pegawai ditempatkan sesuai kompetensinya akan tetapi ketika mereka ingin naik jabatan misalkan dari staff menjadikasubag keuangan maupun sekretaris bukan kemampuan teknis lagi yang dibutuhkan akan tetapi lebih menekankan pada kemampuan manajerial (A. Su'akad,2021). Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Siwambudi yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pemkab Klungkung (Siwambudi dkk., 2017).

Pengaruh variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekalongan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,743 t_{tabel} sebesar 2,011, dan nilai signifikan sebesar 0,088. Hal ini berarti t_{hitung} $1,743 < t_{tabel}$ 2,011, dan nilai signifikan sebesar $0,088 > 0,05$, maka H_0 di terima dan H_a ditolak sehingga variabel pemanfaatan teknologi informasi (X2) tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) Kota Pekalongan.

Analisis diatas diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis tersebut dapat diartikan bahwa hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa pemanfaatan TI memiliki pengaruh positif terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Riandani (Riandani, 2017), Setyowati (Setyowati dkk., 2016) dan Ningrum (Ningrum, 2018) yang menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peneliti berasumsi ada keterbatasan teknologi yang dimiliki serta keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang tidak dapat mengoptimalkan peran teknologi informasi dalam proses akuntansi dikarenakan dominan responden berusia diatas 45 tahun ada 19 responden dengan persentase 37,3% dimana pada usia kategori tersebut responden cenderung sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat saat ini terlebih yang masa kerjanya sudah lebih dari 15 tahun.

Indikator pernyataan pada kuesioner yang dibagikan kepada responden mendapatkan hasil bahwa OPD Kota Pekalongan menggunakan *software* yang bernama SIMDA dari BPKP. Aplikasi SIMDA ini sebagai aplikasi pengganti sementara SIPD dari Kemendagri yang sampai saat ini masih diperbaiki sistemnya. Zaman yang semakin maju menyebabkan penggunaan jaringan internet yang lebih bahkan lancar untuk proses penyusunan laporan keuangan keuangan daerah. Aplikasi SIMDA ini menurut Bapak Ade Su'akad sudah melalui tahap ujicoba dan selalu memback-up data secara otomatis untuk menghindari jaringan internet yang eror, listrik padam, ataupun komputer yang tiba-tiba bermasalah (A. Su'akad, 2021)

Karena komputer adalah salah satu aset penting tiap-tiap OPD maka terdapat jadwal pemeliharaan secara rutin untuk mengantisipasi hal-hal yang diluar dugaan. Perkembangan berbagai macam teknologi informasi terutama komputer dan internet membuat pergeseran tata cara pelayanan publik menjadi sistem online yang terkomputerisasi.

Dalam hal ini Penggunaan *software* akuntansi tersebut dapat berdampak pada peningkatan kualitas terutama berkaitan dengan akurasi dan kecepatan. Artinya apabila pembuatan LKPD mengalami *delayed* maka bisa diakibatkan oleh terkendala aplikasi, *human errors* maupun input dari masing-masing operator.

Secara umum pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintah relatif kurang optimal dan belum menunjukkan arah pembentukan *e-Government* yang baik. Beberapa kelemahan yang menonjol antara lain adalah pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif dan belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan teknologi informasi pada masing-masing instansi sehingga menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD di Kab. Kampar sehingga diperlukan upaya pengembangan terus-menerus dan sinergi untuk meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik (Nasir & Oktari, 2011). Sejalan dengan penelitian dari Arif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemanfaatan teknologi informasi pada suatu satuan kerja maka tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah (Arif, 2017). Dilihat dari data rekap responden untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi, dimana responden rata-rata menjawab setuju. Akan tetapi kenyataannya pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya dapat mempertinggi efektifitas, menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan kinerja, meningkatkan efesiensi aparatur pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Pengaruh variabel sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekalongan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, variabel sistem pengendalin intern (X3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,274, t_{tabel} sebesar 2,011, dan nilai signifikan sebesar di tolak dan H_a diterima sehingga variabel sistem pengendalian intern (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) Kota Pekalongan.

Dari analisis diatas diketahui bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis tersebut dapat diartikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internet memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Chodijah dan Hidayah (Chodijah & Hidayah, 2018), Ramadhani (Ramadhani dkk., 2019) dan Riandani (Riandani, 2017) sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Provinsi DKI Jakarta.

Hasil ini menunjukan bahwa pengendalian internal ternyata menentukan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pada kenyataannya Pemerintah Kota Pekalongan mampu menjalankan kegiatan pengendalian sesuai yang digariskan oleh peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan pengendalian intern pada setiap OPD mampu dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan. Didukung penelitian dari Rahmawati bahwa di Kota Tangerang Selatan pun sudah menerapkan sistem pengendalian intern dengan baik yaitu dengan karyawan yang telah memanfaatkan fasilitas komunikasi dalam bekerja (Rahmawati dkk., 2018).

Pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD (Armel dkk., 2017), karena Sistem pengendalian pengendalian internal meliputi berbagai alat manajemen untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan diberlakukannya sistem pengendalian intern yang memadai maka akan dapat mengurangi kesalahan dalam proses akuntansi sehingga data-data akuntansi terbebas dari sabotase pihak-pihak luar, dan sebagainya (Roshanti dkk., 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Widari dan Sutrisno yang menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern yang tinggi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik pula (Widari & Sutrisno, 2017). Pengendalian internal pemerintah merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumberdaya organisasi dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendekteksian penggelapan serta melindungi sumber daya organisasi.

Kesimpulan

Secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekalongan dengan perbandingan $t_{hitung} 0,541 > t_{tabel}$ sebesar 2,011, dan nilai signifikan sebesar $0,591 > 0,05$. Secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekalongan dengan perbandingan $t_{hitung} 1,743 > t_{tabel}$ sebesar 2,011, dan nilai signifikan sebesar $0,088 > 0,05$. Secara parsial variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekalongan dengan perbandingan $t_{hitung} 6,274 > t_{tabel} 2,011$, dan 0,000.

Hal ini berarti $t_{hitung} 6,274 > t_{tabel} 2,011$, dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Adapun secara simultan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekalongan dengan dibuktikan dengan hasil hitung $f_{hitung} 39,543 > f_{tabel}$ sebesar 2,80 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

Rekomendasi Penelitian

Keterbatasan waktu membuat peneliti tidak melakukan uji tes pilot kuesioner dan menguji validitas data untuk itu peneliti selanjutnya penulis merekomendasikan untuk melakukan uji tersebut dan menambah variabel-variabel yang relevan untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekalongan.

Daftar Pustaka

- Anton, F. X. (2010). Menuju teori stewardship manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2).
- Arfianti, D., & Kawedar, W. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Batang) [*PhD Thesis*]. Universitas Diponegoro.
- Ariesta, F. (2013). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan

- Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Arif, R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Kejelasan Tujuan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kota Padang Panjang). *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Armel, R. Y. G., Nasir, A., & Safitri, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai) [*PhD Thesis*]. Riau University.
- Bastian, I. (2013). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Chodijah, S., & Hidayah, N. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus OPD Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Tekun*, 8(1), 34–48.
- Hardyansyah, H. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Polewali Mandar) [*PhD Thesis*]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Haza, I. I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada OPD Pemerintah kota padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR–Study & Accounting Research*, 11(1), 1–14.
- Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Accountability*, 5(2), 98–109.
- Mahaputra, I. P. U. R., & Putra, I. W. (2014). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 8(2), 230–244.
- Maksyur, N. V., Tanjung, A. R., & Hariyani, E. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Indragiri Hulu) [*PhD Thesis*]. Riau University.
- Nasir, A., & Oktari, R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi*, 19(02).
- Ningrum, K. K. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen*.
- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (sacd), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada OPD kota depok)* [*PhD*].

- Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan [Thesis]. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Pemkot, A. (18 Mei). Pemkot Pekalongan raih predikat WTP ke-5 Secara berturut-turut. *Website Pemkot Pekalongan*.
- Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010).
- Petrovits, C., Shakespeare, C., & Shih, A. (2011). The causes and consequences of internal control problems in nonprofit organizations. *The Accounting Review*, 86(1), 325–357.
- Pradono, F. C. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 22(2).
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).
- Rambe, E., & Sakti, O. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba Empat.
- Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada OPD Kab. Limapuluh Kota). *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Roshanti, A., Edy Sujana, S. E., & SINARWATI, N. K. (2014). Pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah kota Semarang*.
- Siahaya, E., Asnawi, M., & Layuk, P. K. A. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. *KEUDA: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 3(1).
- Siwambudi, I. G. N., Yasa, G. W., & Badera, I. D. N. (2017). Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(1), 385–416.
- Su'akad, A. (2021, April 23). *Hasil Wawancara*, [Komunikasi pribadi].
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh kompetensi SDM dan peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian internal pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 13(2).
- Untary, N. R., & Ardiyanto, M. D. (2015). *Pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Daerah dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi (studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)* [PhD Thesis]. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

- Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., AK, S., & SINARWATI, N. K. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Widari, L., & Sutrisno, S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 5(10), 117–126.
- WP, L. (2021, April 26). *Hasil Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56–64.